

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG DI
KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH HAFIZUL HISYAM

E051201074



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG DI KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Yang disusun dan diajukan oleh:

MUH HAFIZUL HISYAM

E051 201 074

Yang telah dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. A. M. Rusli, M. Si.
NIP. 196407271991 01 1 001

Pembimbing II



Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.
NIP. 19900110 2019 04 3 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si
NIP. 19790106 2005 01 1 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG DI
KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUH HAFIZUL HISYAM

E051201074

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2023

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Sekretaris : Ashar Prawitno S.IP., M.Si.

Anggota : Rahmatullah S.IP., M.Si.

Anggota : Saharuddin S.IP., M.Si.

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Ashar Prawitno S.IP., M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Hafizul Hisyam

NIM : E051201074

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOWANI TOLOTANG DI
KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidendeng Rappang” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai tantangan akan tetapi semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S. IP. M. Si, selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi, serta melibatkan saya dalam beberapa kegiatan beliau untuk menambah pengalaman.
5. Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., selaku kakak tingkat sekaligus pembimbing II, yang selalu memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan motivasi dalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
8. Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sudah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian.
9. Lurah dan pegawai kelurahan Amparita yang sudah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian.

10. Superhero penulis, Abdurahman Ambo Upe sosok yang berperan penting dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendoakan dan berusaha untuk memenuhi semua keinginan anaknya sehingga mampu menyelesaikan studi dengan baik.
11. Wonder woman ku, Afriani Made Ali yang bertugas menjadi sosok dokter, chef, dan guru mulai dari kecil hingga penulis dapat menyelesaikan tulisannya. Semoga setiap Langkah penulis diberkahi dengan doa ibunda, sehingga penulis menjadi orang sukses dunia akherat.
12. Nenek penulis, Ibunda Faridah Syam dengan tulus hati saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala doa, dukungan, dan cinta tanpa batas yang telah Engkau berikan selama ini. Skripsi ini adalah buah dari kerja keras dan restu dari Engkau. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan perlindungan.
13. Adik penulis, Muh. Azizul Hisyam yang menjadi alasan penulis agar bisa menyelesaikan studi dengan baik sehingga bisa membimbing iccung dengan baik. Penulis doakan semoga iccung bisa menjadi versi lebih baik dari penulis.
14. Kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
15. Kepada keluarga kedua penulis diperantauan Kia, Deden, dan Adnan (Allirita Family), terimah kasih telah menjadi tempat berbagi

kebahagian dan kesah penulis selama perkuliahan. Semoga kita tetap menjadi sodara serta Impian yang sering diceritakan menjadi nyata Aamiin.

16. Sodara-sodara penulis di grub NOSASI, Dedeng, Adnan, Cipung, Menma, Fuad, Wisnu, Bryan, Rafli, Farhan, Ishaq, Zihar dan Fadlan. yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga tidak ada kata asing diantara kita Aamiin.
17. Teman-teman angkatan 2020 jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
18. Sodara-sodari KKNT Pertanian dan Perikanan Sidrap Gelombang 110 Posko C Desa Sipodeceng (Ardi, Farida, Dirga, Isti, Iss, Dian, Mita, Maulid, Isma, Indah, dan Hani) beserta bapak dan ibu posko yang selalu menyemangati penulis dan berbagi ilmu serta pengalaman selama melaksanakan KKN.
19. Sodara-sodari penulis yang sama-sama berangkat dari kampung halaman; Bung isar, Eca, Asalia, Vera, Uli, Adam, Ardian, Duo Fajar, Sul kifli, Cikali, Reza, Mamank, Ian, dan seluruh teman KITA2JI SQUAD yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Penulis ucapkan banyak terimah kasih telah kebersamai penulis di perantauan.

Semoga kita semua menjadi manusia yang sukses dunia dan akherat
Aamiin.

20. Kepada Mutiara, sebagai manusia yang selalu ada menemani penulis sampai saat ini. Penulis ucapkan Terima kasih telah menjadi teman berkeluh kesah selama 3,5 Tahun belakangan ini, semoga hal-hal baik tentangmu selalu membersamai penulis hingga dimasa depan.
21. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan karya ilmiah ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin

Makassar, 03 July 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
2.1. Konsep Implentasi Kebijakan	13
2.1.1. Definisi Implementasi	13
2.1.2. Definisi <i>Kebijakan Pemerintah</i>	14
2.1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	16
2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	19
2.2.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat	19
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	22
2.2.3 Prinsi-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	23
2.3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidrap	29
2.3.1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidrap	29
2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidrap	32
2.4 Masyarakat Towani Tolotang Sidrap	33

2.4.1	Sejarah Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap.....	33
2.4.2	Potensi Masyarakat Towani Tolotang Sidrap.....	37
2.5.	Kerangka Konsep.....	40
BAB III	42
3.1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3.	Tipe Penelitian.....	44
3.4.	Informan Penelitian.....	45
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	46
3.6.	Sumber Data	48
3.7.	Fokus Penelitian	49
3.8.	Analisis Data	52
BAB IV	55
4.1	Gambaran Umum.....	55
4.1.1	Keadaan Geografis.....	55
4.1.2	Keadaan Demografi.....	56
4.1.3.	Potensi Masyarakat Towani Tolotang	57
4.1.4	Sejarah dan Agama Kehadiran Masyarakat Adat Tolotang di Amparita	59
4.2.	Hasil Penelitian	63
4.2.1.	Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Terhadap Masyarakat Towani Tolotang Di Kelurahan Amparita.....	67
4.2.2.	Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Terhadap Masyarakat Towani Tolotang Di Kelurahan Amparita.....	70
4.3.	Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Terhadap Masyarakat Towani Tolotang Di Kelurahan Amparita.....	88
4.3.1.	Faktor Pendukung	88
4.3.2.	Faktor Penghambat	98
BAB V	110
5.1.	Kesimpulan.....	110
5.2.	Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel.4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Amparita Dirinci Perdesun Tahun 2017	56
Tabel.4.2 Agama/Aliran di Kelurahan Amparita	59
Tabel.4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidrap.	72
Tabel.4.4 Luas Penggunaan Lahan Kelurahan Amaprita Tahun 2016 ...	82
Tabel.4.5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4. 1 Pasar Utama di Kecamatan Tellu Limpoe.....	83
Gambar 4. 2 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Amparita.....	94
Gambar 4. 3 Agenda Kebudayaan Parinyameng Masyarakat Tolotang ..	96
Gambar 4. 4 Wawancara Kemendagri Mengenai Dana Kelurahan	107

ABSTRAK

Muh Hafizul Hisyam, Nomor Induk Mahasiswa E051201074, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang”**”, dibawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. dan Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di berbagai wilayah, pada masyarakat Tolotang terdapat potensi besar dalam upaya peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan Masyarakat. Didukung dengan lahan pertanian yang luas dan kearifan lokal, namun pada pelaksanaan masih kurang kebijakan maupun program pemberdayaan terhadap Masyarakat Tolotang. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap terhadap masyarakat adat Towani Tolotang. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari Kesetaraan, partisipatif, kewedayaan, dan Keberlanjutani, telah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan di beberapa bagian terutama pada prinsip keberlanjutan dalam pemberdayaan Masyarakat towani Tolotang. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu Toleransi dan Partisipasi, serta Potensi Towani Tolotang, sedangkan faktor penghambat yaitu Tolotang Tidak Berbentuk Lembaga Adat, Minimnya Program Pemberdayaan Dan Minimnya Dana Yang Dimiliki.

Kata Kunci: *Towani Tolotang, Pemberdayaan Masyarakat, Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Amparita*

ABSTRACT

Muh Hafizul Hisyam, Student Identification Number E051201074, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, is writing a thesis entitled: “**Implementation of Government Policies in Empowering the Towani Tolotang Community in Amparita Village, Sidenreng Rappang Regency**”, under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. and Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.

Community empowerment is a crucial aspect of improving living standards and socio-economic development in various regions. Within the Tolotang community, there is significant potential for economic enhancement through community empowerment, supported by extensive agricultural land and local wisdom. However, the implementation of empowerment policies and programs for the Tolotang community remains insufficient. Therefore, this research aims to examine and analyze the Implementation of Government Policies in Empowering the Towani Tolotang Community in Amparita Village, Sidrap Regency, and the factors influencing it.

The research employs a qualitative method. The research location is Amparita Village in Sidrap Regency, focusing on the Towani Tolotang indigenous community. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, literature studies, and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The research findings indicate that the Implementation of Government Policies in Empowering the Towani Tolotang Community in Amparita Village, Sidrap Regency, utilizing the principles of community empowerment, which consist of equality, participation, self-reliance, and sustainability, has been relatively well-executed. However, there is still a need for improvement in certain areas, especially in the principle of sustainability in empowering the Towani Tolotang community. The influencing factors consist of supporting and inhibiting factors. The supporting factors are tolerance and participation, as well as the potential of the Towani Tolotang community, while the inhibiting factors are the lack of formal customary institutions, limited empowerment programs, and insufficient funding.

Keywords: *Towani Tolotang, Community Empowerment, Principles of Community Empowerment, Amparita Village*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di berbagai wilayah. Pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui kebijakan otonomi daerah dan asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat di wilayahnya, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami tuntutan dan keinginan mereka.

Desentralisasi sebagai konsep pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pentingnya pemberdayaan masyarakat menjadi semakin nyata, karena melalui keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses pembangunan akan menjadi agen perubahan yang bisa menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, serta menciptakan keberlanjutan pembangunan

ekonomi yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Terbentuknya kebijakan otonomi daerah dapat dikatakan lahir melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah diamandemen serta diperbaharui dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 merupakan jawaban atas permintaan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan Masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa adalah bagian penting dari terciptanya pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan Masyarakat.

UU yang mengatur lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan adalah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 127 ayat (3) butir b disebutkan bahwa lurah memiliki tugas pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam tataran teknis, LPM diatur Permendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan

dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Menurut Soemantri pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Soemantri, 2011:3). Pandangan ini sejalan dengan apa yang dibahas lebih lanjut Subejo dan Narimo (Dalam Mardikanto dan Soebianto, 2012:31) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dari pendapat para ahli di atas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka membangun dan mengembangkan semua potensi yang ada di masyarakat agar masyarakat benar-benar berdaya baik secara individu, kelompok maupun komunitas lainnya sehingga bisa berkontribusi secara aktual demi menuju kemandirian masyarakat dan desa sesuai yang diharapkan. Upaya peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat sangatlah penting, terutama

bagi masyarakat desa. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat desa, mereka bisa bersaing dengan masyarakat lainnya, meningkatkan taraf hidup serta bisa mengembangkan kemampuan mereka secara baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya sehingga masyarakat desa tidak tertinggal jauh dari masyarakat kota yang lebih maju.

Pemberdayaan masyarakat selalu dianggap sebagai strategi ampuh dalam menyelesaikan berbagai problematika yang ada seperti: kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan deskripsi atas persoalan masyarakat di tingkat perdesaan. Namun fakta di lapangan, bahwa pemberdayaan masyarakat belum mampu untuk menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan umum seperti, akses terbatas terhadap keterampilan dan Pendidikan, ketimpangan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, serta rendahnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki. Selain itu tantangan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi proses terjadinya pemberdayaan masyarakat, seperti adanya norma-norma tradisional yang menghambat perubahan sosial dan partisipasi masyarakat terutama pada Masyarakat adat dan desa.

Selain berbagai permasalahan diatas masih ada satu permasalahan yang paling banyak dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu, keberlanjutan (*sustainable*). Pemerintah beranggapan dengan menjalankan semua program pemberdayaan telah sesuai standar dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tetapi semua upaya tersebut belum memberikan kontribusi yang memadai. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya upaya lanjutan dalam memberdayakan masyarakat, yang menyebabkan program pemberdayaan tersebut dikatakan gagal dalam mencapai keberhasilan.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Najiaty menurut penulis relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dalam prinsi-prinsip pemberdayaan masyarakat Najiaty mengemukakan, bahwa untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan masyarakat, terdapat empat prinsip yang dapat digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu; prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan. Menurut penulis, dengan menerapkan prinsi-prinsip pemberdayaan Masyarakat Najiaty kita dapat merumuskan solusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Indonesia ialah bangsa yang beragam. Oleh karena itu terdapat berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman yang dimiliki Indonesia ada karena setiap daerah, suku, dan agama menunjukkan keunikan budayanya masing-masing. Keberadaan masyarakat Towani Tolotang menjadi salah satu bukti keberagaman yang ada di Indonesia, Masyarakat Towani Tolotang memiliki keunikan dari aspek kepercayaan yang dianut dan diyakini. Perkembangan modernitas akibat kuatnya pengaruh modernisme yang membedakan posisi masyarakat modern dan masyarakat lokal tetap mereka pertahankan.

Masyarakat Tolotang merupakan penganut kepercayaan di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. Berdasarkan sejarah bahwa Tolotang bukanlah penduduk asli Amparita, namun asal usul nenek moyang towani Tolotang berasal dari berasal dari kelurahan Wani di Kabupaten Wajo. Historis perpindahan komunitas ini karena Islamisasi di Kerajaan Gowa sekitar pada abad ke-17. Komunitas ini berada di Amparita sebelum Islam masuk di Kerajaan Wajo, sebelum abad ke-16. Secara keseluruhan jumlah penganut kepercayaan sekitar 40 ribu orang termasuk di luar Sulawesi Selatan (Risal, 2002). Komunitas Tolotang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, hal ini didukung dengan sumber daya alam yaitu lahan sawah yang luas.

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan bentuk konkret dalam upaya memperbaiki hidup dan Pembangunan social ekonomi diberbagai wilayah. Di Sulawesi Selatan pada kabupaten sidenreng rampang (sidrap), khususnya pada masyarakat adat Towani Tolotang terdapat upaya nyata yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dilakukan melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program-program tersebut meliputi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan, serta pengembangan industri kecil dan kerajinan. Diharapkan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat adat Towani Tolotang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, social dan budaya.

Komunitas adat Towani Tolotang yang berada di kabupaten sidrap yang notabennya merupakan daerah Lumbung Pangan Nasional dan sentral konteslasi wilayah penghasil komoditas pangan. Daerah ini menjadikan pertanian sebagai sektor utama pendukung perekonomian masyarakat setempat, hal ini juga

didukung oleh Visi Bupati Kabupaten Sidrap yang ingin mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agrobisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan Sejahtera, selain itu daya tarik pariwisata pada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Towani Tolotang juga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Sidrap. Dengan fakta tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat adat Towani Tolotang yang berjumlah sekitar 2500 orang di kelurahan Amparita memiliki potensi besar dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat mendukung dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Towani Tolotang.

Namun seperti banyak wilayah lainnya, masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap juga mengalami berbagai hambatan dalam proses pemberdayaan Masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti, belum adanya kebijakan secara khusus yang dibuat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat Towani Tolotang. Hal ini dibuktikan dalam Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Sidrap tahun 2019-2023, pada Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan selama lima tahun belum tertera secara khusus program pemberdayaan masyarakat mengenai peningkatan ekonomi Towani Tolotang.

Selain hambatan tersebut dalam Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Sidrap tahun 2019-2023, juga menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti, susahya akses informasi, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya anggaran dalam program pemberdayaan, rendahnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki, serta tidak ada solusi atau tindak lanjut dari pemerintah. Maka dari itu pemberdayaan menjadi penting dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Najiaty yang penulis jadikan sebagai acuan dalam kerangka kerja untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Najiaty dapat memberikan landasan yang kokoh untuk merancang kebijakan dan program pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang berkesetaraan, partisipatif, keswadayaan dan aktif berkelanjutan. Pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah dalam meningkatkan peluang keberhasilan dan keberlanjutan. Selain itu, konsep Najiaty tentang pemberdayaan masyarakat sebagai proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan

masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi masyarakat sendiri.

Dengan berdasar pada permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan menganalisis kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada peningkatan ekonomi Towani Tolotang, Sidrap. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan itu, penulis memutuskan bahwa judul penelitian ini adalah: **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkhususnya dalam meningkatkan kebijakan pemberdayaan masyarakat.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap. Manfaat Teoritis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai konsep dan teori-teori yang digunakan guna memperjelas dan menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat mempermudah memahami realitas yang ada. Konsep dan teori-teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang terjadi bersumber dari buku atau referensi lainnya.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai instrumen analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1. Konsep Implentasi Kebijakan

2.1.1. Definisi Implementasi

Istilah Implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus tersebut, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Implementasi adalah tindakan-

tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Budi Winarno)

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implemenstation and public policy* yang diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino: 2006:153)

2.1.2. Definisi Kebijakan Pemerintah

Defenisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli. Beberapa definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli itu seperti berikut:

1. Mc Rae dan Wilde Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai, "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.
2. Young dan Quinn Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai tindakan yang tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial.
3. Anderson Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai, "Kebijakan- kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah". Jadi menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan

oleh badan-badan pemerintahan seperti; lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal.

4. B. R. S. Parker Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai, "suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau respons terhadap suatu keadaan krisis". Maksud definisi ini bahwa, kebijakan pemerintah itu mempunyai ukuran (asas) dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab/memecahkan masalah atas keadaan kirtis yang dihadapi Masyarakat.

Definisi kebijakan pemerintahan dan contoh-contoh sebagaimana terlihat diatas, dapat membuat anda memahami apa yang disebut kebijakan pemerintahan itu. Dengan demikian, secara umum muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.

2.1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang

harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dalam prakteknya tidak sederhana seperti yang kita ucapkan berkaitan dengan aspek kemampuan rakyat, kesejahteraan, kultur, struktur mau pun "political will" penguasa.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti 'kekuatan atau kemampuan'. Sumodiningrat menjelaskan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat (Ambar Teguh, 2004: 78-79). Lebih lanjut, konsep lain menjabarkan bahwa pemberdayaan memiliki makna 'membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka' (Suparjan dan Hempri 2003). Mengacu pada beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan fisik dan nonfisik. Dalam hal ini masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya akan terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam keseluruhan prosesnya.

Dalam memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pemberdayaan di bawah ini dikemukakan berbagai pendapat dari para ahli dan pakar seperti berikut:

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah

pada individu semata, tetapi juga kolektif (Harry Hikmat, 2001: 46-48).

2. Menurut Pranarka dan Vindhayanika, terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan primer. Pada kecenderungan primer ini proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagai kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.

3. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang social, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi (James William Ife, 1995: 132; Rukminto Adi, 2002: 163-165)

Dari berbagai macam pengertian mengenai pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat

adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, budaya dan agama.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya akan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat;

2. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan;
3. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik;
4. Melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka;
5. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya;
6. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

2.2.3 Prinsi-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan sebuah proses pemberian motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan yang berlandaskan sumber daya pribadi, melalui sebuah partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta memiliki tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Berpijak pada pendapat tersebut, maka dalam

pelaksanaan pemberdayaan memerlukan adanya sebuah prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Senada dengan hal tersebut Najiyati mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut adanya empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan;

1. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat, yang harus dipahami secara bersama. Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Tidak ada dominasi kedudukan atau subordinasi kedudukan di antara pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan.

Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan,

pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai kearifan lokal (indigenous wisdom).

Kesetaraan dalam hal ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan, untuk golongan tua maupun golongan muda. Semua individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

yang sama dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program pembangunan dalam masyarakat.

2. Partisipatif

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya.

Selama ini praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui program-program pembangunan yang dibutuhkannya. Kebanyakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan merupakan program yang sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan partisipasi.

3. Keswadayaan

Banyak program pembangunan di masyarakat yang bersifat caritas, atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal ini bisa dipahami bahwa,

bantuan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya.

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan.

4. Berkelanjutan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsive atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila

program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya.

Hal di atas menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat masih bersifat project based, dan belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan.

Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip memberikan power kepada yang powerless dalam proses pemberdayaan benar-benar dapat diwujudkan. Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana di atas antara lain: (1) masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor dalam pembangunan; (2) program pembangunan yang dilakukan benar-benar berbasis partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah terlibat sejak penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengelolaan hasil-hasil pembangunan; (3) masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya financial; dan (4) program pembangunan yang dilakukan bukan

sekedar project based, tetapi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

2.3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidrap

2.3.1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidrap

Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidrap merupakan perwujudan dari Visi dan Misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, Visi dan Misi tersebut sebagai berikut:

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agrobisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan Sejahtera”

Dari Visi tersebut di atas maka dirumuskan 7 (Tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. tujuannya untuk meningkatkan SDM dan akses kualitas pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tujuannya

untuk mengembangkan potensi pertanian dan daya saing produk yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan dan ketersediaan sarana dan prasarana.

3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru. Tujuannya untuk membangun kerjasama investasi dan usaha melalui peningkatan daya saing dan kualitas SDM dan produk unggulan daerah.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan. Yaitu meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance. tujuannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah melalui peningkatan profesionalisme, penataan kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan public yang responsive.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village) sehat dan mandiri. Tujuannya untuk menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes sesuai potensi desa yang didukung

ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang professional, kreatif dan inovatif.

7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya local sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian seni budaya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang religius, aman, dan kondusif.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi: Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri (Misi 6). Dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Perubahan status desa swadaya menjadi swasembada,

3. Meningkatkan kualitas desa,
4. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan,
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,
6. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Belum optimalnya perencanaan dan pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/ Kota layak anak, dan
7. Meningkatkan kualitas sistem data gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkeadilan gender.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidrap

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2.4 Masyarakat Towani Tolotang Sidrap

2.4.1 Sejarah Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten

Sidrap

Istilah Towani Tolotang terdiri atas kata Towani dan Tolotang. Towani berasal dari kata Tau yang berarti orang dan Wani adalah nama sebuah desa, sehingga Towani berarti orang dari desa Wani. Tolotang berasal dari kata Tau yang berarti orang dan Lotang yang

berarti Selatan. Secara bahasa Tolotang diartikan orang selatan. Namun secara istilah, penamaan Towani Tolotang adalah sebutan bagi orang yang tinggal di sebelah selatan pasar Amparita, hal tersebut untuk membedakan Tolotang Benteng yang tinggal di sebelah selatan benteng. Menurut Wa' Launga, pada mulanya istilah Tolotang adalah panggilan yang digunakan oleh Addatuang dalam hal ini Raja Sidenreng La Patiroi terhadap kelompok/komunitas Towani jika ingin berkomunikasi. Namun pada perkembangan selanjutnya, Towani Tolotang melekat sebagai nama suatu aliran yang diberikan orang lain kepada mereka.

Sejarah awal lahirnya masyarakat Towani Tolotang merupakan agama lokal yang mengakar sebelum datangnya agama Islam. Mereka bertempat tinggal di desa Wani kabupaten Wajo. Atas penolakan mereka untuk masuk agama Islam maka Addatuang Wajo memerintahkan mereka untuk meninggalkan kampung halamannya. Merekapun meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1666 dan bergabung dengan keluarganya yang lebih dahulu tinggal di kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut disepakati oleh Addatuang Sidenreng dengan melakukan perjanjian yang disebut "Ade' Puronrona Sidenreng". Keikutsertaan mereka pada sistem upacara kematian dan perkawinan secara Islam sebagai bukti keikutsertaan mereka kepada Addatuang, namun tidak dimaknai sebagai keikut-sertaan kepada Islam. Sebelum mereka

melaksanakan kedua tata cara Islam tersebut, mereka terlebih dahulu melaksanakan sesuai dengan keyakinan mereka. Pada perkembangan selanjutnya terjadi benturan-benturan dengan tokoh-tokoh Islam yang memaksakan mereka untuk segera masuk Islam secara totalitas, dan pada akhirnya mereka memilih agama Hindu sebagai payung agama mereka. Tolotang memang hidup di Sidrap tetapi tidak seperti Sidrap yang dianggap asli, karena itu harus diberi identitas tersendiri. Penamaan ini jelas mengandung ide tentang negasi dan distingsi. Namun oleh komunitas pengungsi dari Wani, Tolotang ini kemudian diinternalisasi, dimana wacana tentang Tolotang disusun dengan rapi, lalu ditampilkan sebagai identitasnya. Identitas yang dimaksud dalam konteks ini adalah ritual keagamaan yang mampu memberi penjelasan tentang siapa mereka yang disebut dengan Tolotang itu. Identitas dalam pengertian ini bukan sebagai upaya untuk “mencari keunikan” dan “distingsi” antara Tolotang dan komunitas di luar Tolotang semata, tetapi lebih sebagai upaya untuk mengelaborasi sistem yang dipakai komunitas ini dalam membangun sebuah identitas diri yang terus-menerus ada dan bisa dipertahankan (Iskandar, 2019).

Sepanjang perjalanannya, Towani Tolotang telah mengalami beberapa fase perjuangan yang panjang berkaitan dengan kepercayaannya. Hal-hal tersebut adalah: 1) pada awal kedatangannya, Towani Tolotang mendapat penolakan dari pihak

penguasa (kerajaan), namun hak tersebut dapat teratasi dengan dialog yang dilakukan. Dialog yang berlangsung antara kerajaan Addatuang (Sidenreng) dengan Towani Tolotang menyepakati, mereka dapat mendiami wilayah di sebelah selatan Sidenreng; 2) Towani Tolotang pernah dicap sebagai penganut aliran sesat sehingga mendapat serangan berupa intimidasi, bahkan fisik dari kalangan Islam; 4) pada masa penumpasan PKI, Towani Tolotang banyak yang mengaku Islam untuk menyelamatkan diri. Upaya ini dilakukan demi keberlangsungan hidupnya (Hasse, 2016: 180).

Menurut salah satu tokoh masyarakat penganut kepercayaan agama Tolotang di kelurahan amparita memperkirakan bahwasanya jumlah penganut masyarakat adat towani Tolotang di kelurahan amparita kecamatan tellu limpoe di prediksi sampai 3.000 jiwa. Dalam struktur kepemimpinan masyarakat adat Tolotang terbagi atas dua bentuk yaitu vertikal dan horizontal hal itu disebabkan karena dalam sistem kepemimpinan masyarakat adat Tolotang terbagi atas dua klaster kepemimpinan yaitu Uwata dan Uwa.

Posisi Uwatta dan Uwa dalam struktur kepemimpinan masyarakat Tolotang sangat berbeda dari segi fungsi dan tugasnya, dimana Uwatta sebutan terhadap pemimpin tertinggi masyarakat adat towani Tolotang yang lebih banyak bertugas atau berperan sebagai pemangku upacara adat atau ritual. sementara Uwa adalah pemimpin masyarakat adat yang ada di bawah Uwatta. Sehingga

setiap Uwa yang ada dikelurahan amparita kecamatan tellu limpoe kabupaten sidrap memiliki kedudukan yang sama serta fungsi yang sama.

2.4.2 Potensi Masyarakat Towani Tolotang Sidrap

Masyarakat Towani Tolotang yang berada di Kecamatan Tellu Limpoe, Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun kali penulis akan membahas mengenai berbagai potensi yang dimiliki Masyarakat towani Tolotang diberbagai bidang. Potensi tersebut sebagai berikut:

1. Kearifan Lokal

Masyarakat lokal Towani Tolotang memiliki nilai dan kepercayaan yang spesifik dan unik dalam masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kecamatan Amparita Kabupaten Sidrap. Komunitas ini sangat spesifik dan memiliki keunikan dari aspek kepercayaan yang dianut dan diyakini. Masyarakat towani Tolotang sangat konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, bahkan cenderung membentengi diri dari perkembangan modernitas yang semakin modern. Hal ini menjadi salah satu potensi dibidang kearifan lokal yang dimiliki oleh Masyarakat Towani Tolotang.

2. Pariwisata

Dalam bidang pariwisata Masyarakat Towani Tolotang memiliki tradisi dan budaya yang ini seperti ritual tahunan perrinyameng dan ritual pernikahan towani Tolotang. Ritual parrinyameng merupakan ritual tahunan yang dilakukan Masyarakat towani Tolotang setiap tahunnya, ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan tuhan yang maha esa. Selama ritual ini, masyarakat Tolotang akan melakukan berbagai kegiatan seperti upacara adat, tarian, dan music tradisional. Selain ritual parrinyameng terdapat juga ritual pernikahan towani Tolotang yang tidak kalah uniknya yang akan dilaksanakan di depan uwatta yang merupakan keturunan langsung dari pendiri twani Tolotang. Ritual-ritual ini yang akan menjadi daya tarik wisatawan diberbagai daerah untuk datang di Kelurahan Amparita, sehingga bisa meningkat perkonomian Masyarakat towani Tolotang.

3. Pertanian

Masyarakat towani Tolotang terletak Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu daerah pertanian di propinsi Sulawesi Selatan serta merupakan Lumbung Padi Nasional. Hal ini terlihat dari

peran sektor pertanian terutama tanaman pangan yang memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian. Luas lahan sawah di Kabupaten Sidrap pada tahun 2021 seluas 49.396 Ha yang terdiri dari 38.542 Ha sawah irigasi dan 10.854 Ha sawah non irigasi. Di kecamatan tellu lempoe sendiri yang merupakan kecamatan yang paling banyak dihuni oleh Masyarakat Towani Tolotang memiliki luas sawah 1732 Ha sawah irigasi dan 911 Ha non irigasi. Hal tersebut menjadikan Masyarakat Towani Tolotang memiliki SDA yang melipah dibidang pertanian.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Masyarakat Towani Tolotang bisa menjadi modal besar dalam upaya penikatan ekonomi, hal ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6 ayat (1). Sehingga Masyarakat towani Tolotang bisa lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan taraf hidup dan pembangunan sosial-ekonomi di wilayahnya.

2.5. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014). Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap.

Kerangka Pikir Penelitian:

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (**UU yang mengatur lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan adalah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah**)

Towani Tolotang Kelurahan Amparita Sidrap

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi (**Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6 ayat (1)**)
Towani Tolotang Melalui Potensi yang Dimiliki

Prinsip-Prinsip pemberdayaan Masyarakat:

1. Kesetaraan
2. Partisipatif
3. Ksewadayaan
4. Keberlanjutan

Terwujudnya program pemberdayaan masyarakat yang, setara, partisipatif, ksewadayaan, dan berkelanjutan terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat Towani Tolotang

Faktor Yang Mempengaruhi:

1. Faktor Pendukung
 - a. Toleransi dan Partisipasi
 - b. Potensi Tolotang
2. Faktor Penghambat
 - a. Tidak Berbentuk Lembaga Adat
 - b. Minimnya Program Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Minimnya Dana Yang Dimiliki

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir